

Potensi *Green budgeting* dalam Meningkatkan Efisiensi Pengeluaran Publik untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Siti Mutmainah^{1*}, Slamet Wijiono², Muhammad Ryan Romadhon³

¹UIN KH Achmad Siddiq Jember, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Jember, Indonesia

Email : muthmainah56@gmail.com^{1*}, wijionoslamet@yahoo.com², ryanromadhon19@gmail.com³

Korespondensi penulis : muthmainah56@gmail.com

Abstract. *Climate change is a global challenge that affects various aspects of life, including economic development. The concept of green budgeting has emerged as an important strategy to ensure the efficiency of public spending while supporting sustainable development in Indonesia. This research analyzes the potential of green budgeting to enhance the efficiency of environmental budget management, focusing on public fiscal policies that align with sustainability. By implementing mechanisms such as climate-based budgeting (CBT), the government can increase the budget for programs aimed at mitigating and adapting to the impacts of climate change, but also faces structural challenges such as a lack of human resources and the absence of a comprehensive oversight system. This study adopts a qualitative approach to identify the relationship between public expenditure efficiency and the implementation of green budgeting in development policy, using literature review methods. Research results show that the distribution of green budgets in the state budget (APBN) is still limited, indicating a potential inefficiency in fund allocation. Therefore, it is necessary to enhance institutional capacity, integrate monitoring systems, and commit to implementing fiscal policies that consider the environment by both the central and local governments.*

Keywords: *Green budgeting, Public Expenditure Efficiency, Sustainable Development, Climate Change.*

Abstrak. Perubahan iklim adalah tantangan global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan ekonomi. Konsep anggaran hijau muncul sebagai strategi penting untuk memastikan efisiensi pengeluaran publik sambil mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis potensi anggaran hijau untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran lingkungan, dengan fokus pada kebijakan fiskal publik yang sejalan dengan keberlanjutan. Dengan menerapkan mekanisme seperti penganggaran berbasis iklim (CBT), pemerintah dapat meningkatkan anggaran untuk program mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sistem pengawasan yang komprehensif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara efisiensi pengeluaran publik dan pelaksanaan anggaran hijau dalam kebijakan pembangunan, menggunakan metode tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi anggaran hijau dalam APBN masih terbatas, yang mengindikasikan potensi inefisiensi dalam penyaluran anggaran. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kapasitas kelembagaan, mengintegrasikan sistem pemantauan, dan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan fiskal yang memperhitungkan lingkungan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kata kunci: *Green budgeting, Efisiensi Pengeluaran Publik, Pembangunan Berkelanjutan, Perubahan Iklim.*

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Konsep transisi menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan semakin menarik perhatian (Pratama, Darmansyah, Subandi, & Ibrahim, 2024). Saat ini, masalah keberlanjutan menjadi perhatian global, dan agenda negara-negara berfokus pada upaya untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia berusaha mencapai keberlanjutan melalui berbagai strategi. Anggaran negara berkelanjutan (APBN) adalah

elemen penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak keseimbangan lingkungan dan sosial, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Bukran & Ramdani, 2024)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional tahun buku 2021 disusun berdasarkan persyaratan yang diperlukan untuk operasional pemerintahan dan kemampuannya untuk mengamankan penerimaan nasional, dan bertujuan untuk mendukung tercapainya ekonomi nasional berbasis demokrasi ekonomi dan sosialisme. Penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi, keadilan, keberlanjutan, pertimbangan lingkungan, kemandirian, serta kemajuan dan konsolidasi perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Keuangan Nasional No. 17 Tahun 2003, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) wajib disiapkan dan disetujui oleh Parlemen setiap tahun untuk melaksanakan tugas negara demi kepentingan bangsa. APBN mencakup estimasi pendapatan yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penting selama tahun anggaran untuk masing-masing kementerian dan lembaga (Putra et al., 2025).

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan pembangunan di berbagai bidang. Dalam prosesnya, penggunaan sumber daya alam dan ekstraksi mineral yang berlebihan merupakan risiko yang berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam perbaikan infrastruktur dan meningkatkan perekonomian (Mutmainah & Romadhon, 2023). Indonesia berada di *Ring of fire* rentan terhadap bencana alam sehingga harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dalam semua kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pembentukan program berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan diabadikan dalam RUU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran yang tepat untuk mendukung keberlanjutan ekosistem. Anggaran lingkungan adalah alat strategis yang seharusnya dikelola secara bertanggung jawab oleh pemerintah dan parlemen untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak mengganggu keseimbangan antara lingkungan dan sosial (Shinta & Fidiana, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah kunci utama untuk mencapai kesejahteraan sosial dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pada September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari 17 tujuan, disertai dengan 169 tujuan terukur dengan tenggat waktu tertentu, dengan tujuan mengubah dunia (manusia, tanah, kemakmuran). Hal ini sejalan dengan upaya negara kita untuk mencapai Visi Emas

Indonesia 2045 dengan tetap memiliki infrastruktur berkualitas tinggi dan melestarikan ekosistemnya (Romadhon & Mutmainah, 2023). Dalam komitmennya untuk menanggulangi perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk memastikan tercapainya target iklim yang tercantum dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), yang mencakup penurunan emisi tanpa syarat sebesar 31,89% dan penurunan emisi bersyarat sebesar 43,20%. Salah satunya adalah dengan memasukkan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan dan penganggaran nasional di pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pemanfaatan keuangan publik yang lebih ramah lingkungan (Simanjuntak & Mufida, 2023).

Sejak tahun 2016, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Kebijakan Multilateral dengan dukungan *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mengembangkan *Climate Budget Tagging* di tingkat nasional untuk mengidentifikasi, melacak, dan memantau program dan belanja terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Selama kurun waktu 2019 – 2021, alokasi anggaran perubahan iklim Indonesia mencapai Rp286,86 triliun atau dirata-ratakan sebesar Rp93,57 triliun/tahun (Kemenkeu, 2022). Selain itu, dengan menggunakan hasil analisis *climate budget tagging*, pemerintah dapat menciptakan instrumen pembiayaan yang inovatif, seperti sukuk hijau, obligasi biru, dan lain-lain, sebagai sumber pendanaan alternatif untuk membiayai/membiayai kembali proyek-proyek hijau di Indonesia (Simanjuntak & Mufida, 2023).

Dalam penerapan *Climate Budget Tagging* (CBT), fokus utamanya adalah pembiayaan perubahan iklim di tingkat lokal, nasional, dan supranasional. Pendanaan ini bersumber dari berbagai sumber, termasuk dana publik, investasi sektor swasta, dan mekanisme pembiayaan alternatif yang mendukung program mitigasi dan adaptasi untuk memastikan perubahan iklim tangguh. Sesuai dengan komitmen dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC), Indonesia memerlukan anggaran sebesar 3.799 triliun rupiah untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dan menangani dampak perubahan iklim (Shinta & Fidiana, 2023). Oleh karena itu, melalui penerapan *Climate Budget Tagging*, pemerintah dapat memastikan keberlanjutan lingkungan dan mengoptimalkan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan upaya tersebut, *Green budgeting* (anggaran hijau) merupakan pendekatan penganggaran yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal publik dengan tujuan lingkungan dan perubahan iklim. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendefinisikan anggaran hijau sebagai penggunaan

berbagai instrumen anggaran untuk menilai dampak lingkungan dari pengeluaran negara dan untuk menjamin konsistensi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (OECD, 2022). Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah adalah memberikan prioritas pada isu perubahan iklim dalam rencana pengembangan dan melaksanakan *Green budgeting* (anggaran hijau). Konsep ini memainkan peran penting dalam tata kelola yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola anggaran berdasarkan prinsip keberlanjutan finansial, sosial, dan lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Shinta & Fidiana, 2023). Selain itu, pemerintah daerah harus memprioritaskan isu manajemen lingkungan sebagai bagian penting dari penyusunan anggaran dan rencana pengembangan.

Dalam konteks efisiensi pengeluaran publik menjadi isu penting karena ketidakseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kapasitas keuangan dapat mengakibatkan permasalahan. Efisiensi pengeluaran publik bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan mencapai pertumbuhan ekonomi. Efisiensi ini dinilai melalui evaluasi ekonomi, dan terutama mencakup tiga aspek; evaluasi ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Proses ini bertujuan untuk mengurangi biaya, memastikan pencapaian tujuan kebijakan, dan meningkatkan rasio pengembalian antara input dan output. Oleh karena itu, belanja publik yang efektif dapat meningkatkan nilai penggunaan anggaran dan mendukung kebijakan yang lebih bernuansa (Yetmi, 2021). Menurut sebuah studi Tiongkok (2022), hubungan antara belanja publik dan produktivitas hijau berbentuk terbalik, dengan pengeluaran berlebihan menunjukkan penurunan efisiensi (Zhao & Xu, 2022).

Di Indonesia, proporsi belanja lingkungan pemerintah daerah tidak melebihi 1%, menunjukkan kemungkinan inefisiensi dalam distribusi anggaran. Namun, penerapan anggaran hijau di tingkat lokal menghadapi banyak tantangan struktural seperti kendala sumber daya manusia dan tidak adanya sistem pemantauan, yang membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan efisiensi anggaran lingkungan (Nihayah & Diastuti, 2023). Beberapa penelitian terdahulu tentang kaitan *Green budgeting* (anggaran hijau) dan efisiensi pengeluaran publik dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan pernah dilakukan oleh (Shinta & Fidiana, 2023) dan (Putu, Puspita, Gede, Dwi, & Darmawan, 2023). Dalam penelitian (Novianti & Khairunnisa, 2025) dan (Hadi, 2024) dijelaskan bahwa dalam upaya mewujudkan lingkungan hijau harus dilakukan melalui pembentukan anggaran cerdas dan berkelanjutan. APBN berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta mengintegrasikan prinsip ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Dalam konteks Indonesia, penelitian ini penting untuk menganalisis potensi anggaran hijau dalam meningkatkan efisiensi belanja publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan merumuskan rekomendasi untuk membantu pemerintah melaksanakan strategi anggaran hijau dengan lebih efektif. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman tentang peran anggaran hijau dalam meningkatkan efisiensi belanja publik dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui pendekatan yang tepat, kebijakan publik berbasis lingkungan berpotensi menjadi alat efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Green budgeting

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mendefinisikan anggaran hijau sebagai penggunaan berbagai instrumen anggaran untuk menilai dampak lingkungan dari pengeluaran negara dan untuk menjamin konsistensi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (OECD, 2022). Dalam konteks ini, kebijakan anggaran dirumuskan agar selaras dengan tujuan kebijakan iklim dan lingkungan (Kete, 2022). *Green budgeting* (anggaran hijau) adalah model anggaran di mana kelestarian lingkungan diprioritaskan dalam pengembangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Dengan demikian, semua hal yang berkaitan dengan belanja dan penerimaan pemerintah harus berusaha untuk memenuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Secara umum, *Green budgeting* (anggaran hijau) merupakan gagasan praktis terkait implementasi pembangunan berkelanjutan, dan telah diintegrasikan ke dalam dokumen kebijakan berdasarkan prinsip keberlanjutan keuangan, sosial dan lingkungan. Meski sudah masuk dalam RPJMN, gagasan perencanaan keuangan hijau masih baru, terutama bagi pemerintah daerah, di mana mereka membutuhkan komitmen dan dukungan bersama (Putu et al., 2023).

Efisiensi Pengeluaran Publik

Efisiensi belanja publik adalah keadaan di mana alokasi sumber daya pemerintah tidak dapat lagi dialokasikan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya, yaitu kesejahteraan masyarakat (Yetmi, 2021). Apabila keadaan ini tercapai, belanja publik dikatakan efisien. Secara konseptual, efisiensi belanja publik menghubungkan input (sumber daya/anggaran), output (hasil langsung dari belanja), dan

outcome (dampak akhir yang diharapkan). Semakin besar outcome yang dihasilkan dengan input yang sama atau lebih sedikit, maka belanja publik semakin efisien (Nuryadin, Rahayu, & Muzdalifah, 2020). Di Indonesia, teori efisiensi belanja publik diterapkan melalui sistem penganggaran berbasis hasil. Dalam sistem ini, semua anggaran harus didasarkan pada target kinerja tertentu dengan indikator input, output, dan kinerja yang jelas. Alokasi dana yang efisien berarti mencapai tujuan strategis dengan sumber daya yang paling sedikit tanpa mengorbankan kualitas outcome (Peneliti, Bekerjasama, & Bidang, 2016).

Alokasi anggaran untuk program lingkungan harus selaras dengan kebutuhan infrastruktur lainnya. Upaya manajemen lingkungan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, *Green budgeting* (anggaran hijau) dan perencanaan lingkungan merupakan sarana penting untuk menilai visi dan tugas walikota, serta mengukur kontribusi pemerintah daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Hal ini tidak meningkatkan efektivitas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi penerapan konsep ini juga berkontribusi untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan secara lebih transparan dan efektif. Menurut Sedarmayanti (2003), dari sudut pandang fungsional, pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan. Sebaliknya, untuk mengevaluasi ketidak efisienan ketika pemerintah tidak berfungsi secara efektif, diperlukan tiga pilar. Ini mencakup kepemimpinan politik, khususnya proses pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan, tata kelola administratif, sistem pelaksanaan proses kebijakan, serta proses pengambilan keputusan yang mendukung keadilan, pengentasan kemiskinan (kesejahteraan), dan kualitas hidup.

Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan suatu konsep pembangunan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara menyeimbangkan tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan (Pertiwi, 2021). Prinsip-prinsip utama teori tersebut meliputi keadilan antargenerasi, pemerataan manfaat pembangunan, pencegahan dini kerusakan lingkungan, internalisasi biaya lingkungan ke dalam perhitungan ekonomi, dan pengintegrasian dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan (Romadhon & Mutmainah, 2023). Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan sosial secara adil dan merata, melindungi lingkungan dan sumber daya alam,

menjaga keseimbangan ekologi, dan menjamin mutu hidup yang tinggi bagi generasi sekarang dan mendatang (Mutmainah & Romadhon, 2023). Teori tersebut mengharuskan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya dan mutu hidup lintas generasi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang menyusun sejumlah data dalam bentuk kata-kata. Adapun analisis data kualitatif ditujukan untuk membuat pendapat yang valid dari begitu banyak jumlah data yang dikumpulkan (Sekaran & Bougie, 2017). Untuk pencarian studi literatur yang komprehensif, melakukan pencarian dari banyak database yang dipilih berdasar jumlah hasil yang tinggi: Science Direct, Google Scholar, Web of Science, etc (Mutmainah & Romadhon, 2023). Dalam pengumpulan data, menggunakan metode dokumentasi dari data sekunder dengan mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai jurnal, laporan, buku, website dan lainnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya, dibahas secara mendalam pada bagian kajian pustaka serta membuat perbandingan antar hasil temuan terdahulu dengan teori yang tersedia guna mendapatkan hasil yang valid menurut keduanya (Saputra & Ali, 2022). Penelitian ini memfokuskan pada studi tentang potensi penerapan *green budgeting* dalam upaya meningkatkan efisiensi pengeluaran publik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

***Green budgeting* Sebagai Instrumen Efisiensi Pengeluaran Publik**

Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah dengan melihat tingkat efisiensi. Efisiensi secara teoritis adalah perbandingan antara input dan output. Apabila suatu proses dalam suatu organisasi menggunakan masukan (input) seminimal mungkin untuk menghasilkan keluaran (output) semaksimal mungkin, proses tersebut dianggap efisien (Arifin, 2007). Salah satu wujud peran serta pemerintah dalam mengefisienkan anggarannya yakni melalui program penganggaran hijau. *Green budgeting* bukan hanya soal alokasi dana untuk program “hijau”, tetapi tentang menganalisis seluruh pengeluaran dan subsidi pemerintah dari perspektif lingkungan.

Penganggaran hijau atau *green budgeting* merupakan salah satu cara pemerintah memasukkan masalah perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan mereka. *Green budgeting* adalah ide strategis untuk menerapkan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan

anggaran yang tepat harus diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan secara finansial, sosial dan lingkungan. Berbicara tentang anggaran dan program pembangunan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan pengelolaan lingkungan hidup sebagai masalah penting. Jika mereka memprioritaskan anggaran untuk mendukung program ini, mereka juga harus mempertimbangkan program infrastruktur lainnya. Semua pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat harus mendukung upaya pengelolaan lingkungan (Shinta & Fidiana, 2023).

Green budgeting berusaha mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan keuangan dan lingkungan dengan mempertimbangkan efisiensi energi, pengurangan emisi karbon serta pematuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat. Oleh karena itu penyusunan *green budgeting* memperhatikan prinsip dan karakteristik sebagai berikut:

1. *Green budgeting* memprioritaskan tujuan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang, yang mana keputusan penganggaran sering kali didasarkan pada dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan komunitas atau masyarakat.
2. Persyaratan investasi didasarkan pada profitabilitas dan dampak lingkungan. Proyek yang menggunakan teknologi bersih atau yang ramah lingkungan sering kali menjadi prioritas, hal itu bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan serta mengurangi jejak karbon.
3. *Green budgeting* dapat menggunakan sumber pembiayaan hijau seperti green bonds atau pinjaman dengan bunga rendah untuk proyek berkelanjutan.
4. Pengukuran keberhasilan mencakup pencapaian tujuan lingkungan, seperti pengurangan emisi, efisiensi sumber daya dan peningkatan kualitas lingkungan hidup (Indriyani & Anggraeni., 2024)

Green budgeting merupakan alat strategis untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik dengan mengarahkan anggaran ke program yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas belanja negara, penganggaran hijau meningkatkan ketahanan fiskal dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Integrasi *Green budgeting* Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Green budgeting merupakan suatu pendekatan inovatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran negara. *Green budgeting* muncul sebagai alat yang dapat mengarahkan sumber daya publik untuk mendukung kebijakan lingkungan yang ramah

lingkungan seiring dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap masalah lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan degradasi sumber daya alam. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anggaran nasional tidak hanya berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Manohara, Nurdin, & Tjenreng, 2025).

Keberhasilan *Green budgeting* bergantung pada bagaimana anggaran dialokasikan untuk program-program yang mendukung keberlanjutan seperti pengelolaan energi terbarukan dan pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan penerapan *Green budgeting* mengharuskan pemerintah untuk berkonsentrasi pada kebijakan yang bukan hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga efek jangka panjangnya terhadap lingkungan. Meskipun alokasi anggaran yang tepat itu menentukan keberhasilan, hal yang lebih penting adalah agar kebijakan lingkungan yang diterapkan sesuai dengan tujuan fiskal dan anggaran negara (Fathia, 2025).

Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus memastikan bahwa program lingkungan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan. Keberhasilan *Green budgeting* juga dipengaruhi oleh keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. *Green budgeting* dapat berjalan efektif dan berhasil, memerlukan transparansi anggaran yang cukup dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan serta evaluasi kebijakan tersebut (Kambuam, 2024).

Kebijakan penerbitan obligasi hijau, yang dimaksudkan untuk membiayai proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan adalah salah satu contoh nyata penerapan kebijakan fiskal hijau. Indonesia menerbitkan green bonds pertama sebesar 1,25 miliar dolar pada tahun 2020 untuk mendukung proyek yang menurunkan emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Proyek-proyek yang didukung oleh utang hijau ini termasuk pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Penerbitan obligasi hijau ini merupakan kemajuan besar dalam mengembangkan berbagai sumber pembiayaan untuk proyek berkelanjutan (Keliat et al., 2022).

Meskipun sudah ada beberapa kemajuan, tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan fiskal hijau adalah memperkuat regulasi dan institusi yang ada serta meningkatkan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan benar dan efektif. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Indonesia (2024), anggaran untuk sektor lingkungan dialokasikan sebesar IDR 12,5 triliun

pada APBN 2024. Namun, sekitar 60% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk konservasi dan pengelolaan hutan, dan sebagian besar pembiayaan untuk proyek hijau masih bergantung pada pembiayaan eksternal seperti *green bonds* (Putra et al., 2025).

Tantangan Dalam Implementasi *Green budgeting* Di Indonesia

Tantangan utama dalam implementasi *green budgeting* di Indonesia terletak pada penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Meskipun secara mekanisme formal, sistem penganggaran daerah sudah cukup fit dan selaras dengan konsep *green budgeting*, namun fenomena *politic capture* menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam praktiknya. *Politic capture* merupakan fenomena yang lazim terjadi di tingkat pemerintah daerah, di mana alokasi anggaran publik tidak merujuk pada road map pembangunan nasional atau kebutuhan riil masyarakat, melainkan didasarkan pada kepentingan politik kepala daerah. Fenomena ini menciptakan distorsi dalam penganggaran dan berdampak langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan strategis seperti *green budgeting* (Yetmi, 2021).

Fenomena *politic capture* terjadi karena adanya berbagai faktor struktural, kelembagaan, dan politis yang saling berkelindan di tingkat pemerintah daerah. Penyebab utama fenomena ini antara lain: Konsentrasi kekuasaan pemerintah daerah kepada Kepala Daerah; Orientasi politik jangka pendek; lemahnya pengawasan; rendahnya partisipasi publik; dan dominasi kepentingan patronase politik (Wasi, 2025).

Implementasi *green budgeting* di Indonesia bukan hanya sebuah opsi, melainkan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan visi SDGs 2030 dan target Indonesia sebagai Negara Maju 2045. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, *green budgeting* dapat menjadi alat utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal membawa dampak positif tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga bagi lingkungan dan kesejahteraan sosial. Inilah saatnya Indonesia mengambil langkah konkret untuk menjadi pelopor pembangunan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, *Green budgeting* (anggaran hijau) merupakan gagasan praktis terkait implementasi pembangunan berkelanjutan, dan telah diintegrasikan ke dalam dokumen kebijakan berdasarkan prinsip keberlanjutan keuangan, sosial dan lingkungan. Meski sudah masuk dalam RPJMN, gagasan perencanaan keuangan hijau masih baru, terutama bagi pemerintah daerah, di mana mereka membutuhkan komitmen dan dukungan bersama. Salah satu wujud peran serta pemerintah dalam mengoptimalkan anggarannya yakni melalui program penganggaran hijau. *Green budgeting* bukan hanya soal alokasi dana untuk

program “hijau”, tetapi tentang menganalisis seluruh pengeluaran dan subsidi pemerintah dari perspektif lingkungan

Keberhasilan *Green budgeting* bergantung pada bagaimana anggaran dialokasikan untuk program-program yang mendukung keberlanjutan seperti pengelolaan energi terbarukan dan pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan penerapan *Green budgeting* mengharuskan pemerintah untuk berkonsentrasi pada kebijakan yang bukan hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga efek jangka panjangnya terhadap lingkungan. Meskipun alokasi anggaran yang tepat itu menentukan keberhasilan, hal yang lebih penting adalah agar kebijakan lingkungan yang diterapkan sesuai dengan tujuan fiskal dan anggaran negara. Meskipun sudah ada beberapa kemajuan, tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan fiskal hijau adalah memperkuat regulasi dan institusi yang ada serta meningkatkan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan benar dan efektif.

Saran

Walaupun memiliki potensi besar, penerapan *green budgeting* di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, sehingga saran terhadap pemerintah antara lain:

1. Lembaga pemerintah perlu mengintegrasikan aspek lingkungan dalam penganggaran dana APBN secara komprehensif.
2. Perlu adanya standar klasifikasi belanja hijau yang terintegrasi secara nasional.
3. Koordinasi antar instansi (pusat dan daerah) dalam menyusun dan memantau anggaran hijau masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, J. (2007). Pengaruh karakteristik gaya penyusunan anggaran terhadap efisiensi biaya. *Sinergi*, 9(1), 23–36. <https://doi.org/10.20885/sinergi.vol9.iss1.art2>
- Bukran, & Ramdani, R. (2024). Pengaruh kebijakan ekonomi hijau terhadap inovasi bisnis berkelanjutan di sektor manufaktur. *Economist*, 1(3), 35–42. <https://e.journal.titannusa.org/index.php/economist>
- Fathia, S. N. (2025). Hubungan antara transparansi anggaran dan partisipasi publik dalam green budgeting pemerintah pusat. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(April). (Tanpa halaman atau DOI/link, lengkapi jika ada)
- Hadi, B. (2024). Implementasi APBN berkelanjutan di Indonesia: Studi konseptual dan empiris. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.591>

- Indriyani, E., & Anggraeni. (2024). Green budgeting (pengaruh manajer dalam pengambilan keputusan). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Kambuam, W. (2024). Desentralisasi dan otonomi khusus: Dinamika sistem politik Indonesia di Merauke. Tanpa nama jurnal, tanpa volume/edisi, 8282–8299. (Lengkapi informasi jurnalnya)
- Keliat, M., Hirawan, F. B., Lestari, I., Farizi, O., Xu, N., Noor, R., ... Marzuki, R. (2022). Ekonomi hijau dalam visi Indonesia 2045. Penulis Asisten Penulis.
- Kete, H. (2022). Green budgeting: France and Italy practices. *Uluslararası Sosyal Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi*, 2(2), 102–115.
- Manohara, B. P., Nurdin, I., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Optimasi TIK di sektor keuangan dan ekonomi, studi kasus Kabupaten Banyuwangi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5(1).
- Mutmainah, S., & Romadhon, M. R. (2023a). Halal agriculture as an effort to strengthen the global halal value chain in order to increase international trade. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 187–200. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art11>
- Mutmainah, S., & Romadhon, M. R. (2023b). Pendayagunaan green sukuk dalam menghadapi perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 187–200.
- Nihayah, D. M., & Diastuti, R. (2023). The role of green budgeting on environmental quality on Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 12(2), 217–230. <https://doi.org/10.15294/edaj.v12i2.68929>
- Novianti, I., & Khairunnisa. (2025). Membangun lingkungan hijau dengan anggaran cerdas dan penguatan mental usaha (Dari biji menghasilkan rupiah) di Desa Mekarsari Rajeg. *Kalandra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 49–59.
- Nuryadin, M. R., Rahayu, D., & Muzdalifah, M. (2020). Efisiensi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. *Ecoplan: Journal of Economics and Development Studies*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i1.82>
- OECD. (2022). Green budgeting. OECD. <https://www.oecd.org/en/topics/green-budgeting.html>
- Peneliti, T., Bekerjasama, P., & Bidang, D. (2016). Kajian efisiensi pengeluaran publik bidang OECD. (Nama penerbit/jurnal tidak tersedia, lengkapi jika ada)
- Pertiwi, N. (2021). Implementasi sustainable development di Indonesia. Pustaka Ramadhan.
- Pratama, I. N., Darmansyah, Subandi, A., & Ibrahim, A. H. (2024). Public communication strategies in sustainable development goals. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 61–68.
- Putra, E., Pratama, I. N., Dinar, S., Ningrum, S., Lestari, N., Azhari, M. A., ... Mataram, U. M. (2025). Implementation of green fiscal policy in the state revenue budget: Opportunities and challenges for a sustainable economic transition in Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 39–51.

- Putu, N., Puspita, Y., Gede, N., Dwi, U., & Darmawan, P. (2023). Anggaran hijau (green budgeting) dan faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik regional bruto (PDRB) hijau pada sektor kehutanan di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 11(2), 344–357.
- Romadhon, M. R., & Mutmainah, S. (2023). Harnessing green sukuk for sustainable development in MENA. *IRJEMS: International Research Journal of Economics and Management Studies*, 2(2), 343–351. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V2I2P137>
- Saputra, F., & Ali, H. (2022). Penerapan manajemen POAC: Pemulihan ekonomi serta ketahanan nasional pada masa pandemi Covid-19 (literature review manajemen POAC). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(3), 316–328. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.733>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis (pendekatan pengembangan-keahlian)* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Shinta, T. D., & Fidiana. (2023). Implementasi green budgeting pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(8), 1–17.
- Simanjuntak, K. U., & Mufida, S. (2023). Indonesian local government's participation to achieve national climate target. UNDP Indonesia. <https://www.undp.org/indonesia/blog/indonesian-local-governments-participation-achieve-national-climate-target>
- Wasi, I. (2025). Green budgeting: Pilar pembangunan berkelanjutan. *Harian.co.id*. <https://harian.fajar.co.id/2025/01/30/green-budgeting-pilar-pembangunan-berkelanjutan/2/>
- Yetmi, U. S. (2021). Penilaian terhadap efisiensi pengeluaran publik: Tinjauan literature. *Ekonomi Bisnis*, 27(2), 739–753. <https://doi.org/10.33592/jeb.v27i2.2075>
- Zhao, W., & Xu, Y. (2022). Public expenditure and green total factor productivity: Evidence from Chinese prefecture-level cities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph19095755>